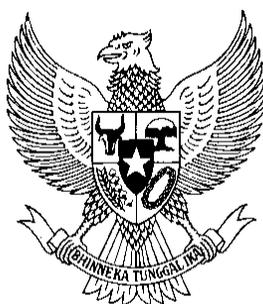




Ngawi Ramah

RENCANA KERJA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024**



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);
45. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01);
51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 19);
52. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 150 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 76 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 76);
53. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disusun berpedoman pada:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2024

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh Perangkat Daerah setiap tahunnya, karena pada dasarnya merupakan rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam lima tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Nomor 25 Tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut berpedoman pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005 – 2025;
2. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024;
3. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian Target Kinerja;
4. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.
5. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

44. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor.10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun.2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.2012 Nomor 19);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 9);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
50. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 150 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 76 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 76);
51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi;
52. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan - tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

- a. Menjabarkan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2024.
- b. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2024.

- c. Mengukur kinerja pelayanan bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan anak, bidang keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera.
- d. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- e. Mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.
- f. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2024 adalah :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam satu tahun anggaran;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
- c. Sebagai bahan penyusunan indikator evaluasi kinerja setiap tahunnya;
- d. Sebagai bahan perumusan evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. Sebagai bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan capaian target kinerja Rencana Strategi dan Rencana Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi Tugas dan Kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

- 1.3 Maksud dan tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
- Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
Memuat kajian terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun - tahun sebelumnya.
- Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Bab ini antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan.
 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Perangkat Daerah
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan Norma, Standart, Prosedur, Kriteria dan Standart Pelayanan Minimal, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai :
- a. Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah.
 - b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.
 - c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
 - d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah
 - e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

tahun yang direncanakan.

- 2.4 Review terhadap Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Berisikan uraian mengenai :
- a. Proses membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan
 - b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
 - c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategi Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah pada umumnya dapat dilaksanakan dengan baik, adapun capaian kinerja Tahun 2022 secara fisik rata – rata mencapai 97,99% sedangkan untuk keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 15.773.185.487,- dengan realisasi Rp. 14.68.936.254,- dengan capaian 92.75%. Secara akumulasi kinerja telah tercapai dengan baik namun masih terdapat kekurangan/hambatan baik internal maupun eksternal, untuk itu akan kami tingkatkan penyempurnaan kegiatan dan efektifitas anggaran sehingga program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dimasa mendatang akan lebih baik bagi kemajuan Kabupaten Ngawi. Untuk perkiraan capaian pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023 dimungkinkan dan diharapkan bisa tercapai 100%. Jika dijabarkan lebih lanjut untuk evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan
 - 1) Program Pembinaan Keluarga Berencana
 - a. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - a) Sub Kegiatan Penguatan pelaksanaan penyuluhan penggerakan pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB PLKB dari target 60 kali realisasi 54 kali, hal ini dikarenakan terdapat 1 (satu) orang PKB Non ASN yang tidak dibayarkan jasanya karena meninggal dunia pada bulan juni.
 - b. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dari target rehab balai penyuluhan 3 balai realisasi 0 kali, hal ini disebabkan karena lokus yang sudah ditetapkan BKKBN Pusat tidak sesuai dengan lokus yang di inginkan oleh Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB BKR BKL PPPKS PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS dari target calon pengantin yang di dampingi sejumlah 13122 orang realisasi 12559 orang dan ibu hamil yang didampingi dari target 87616 orang realisasi 82177 orang, hal ini menyesuaikan ketersediaan jumlah dan data.
- 3) Program Perlindungan Perempuan
 - a. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dari target penginapan yang disediakan bagi korban 7 kali realisasi 6 kali dan jumlah visum dari target 51 kali realisasi 47 kali hal ini karena menyesuaikan jumlah korban yang ditangani.
- 4) Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota dari target penginapan yang disediakan bagi korban 9 kali realisasi 6 kali dan jumlah visum dari target 66 kali realisasi 57 kali hal ini karena menyesuaikan jumlah korban yang ditangani.
- 2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Pengendalian Penduduk
 - a. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Program Keluarga Berencana
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - b. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 4) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

- a. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- b. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 5) Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6) Program Perlindungan Perempuan
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kab/Kota
- 7) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 8) Program Pemenuhan Hak Anak
 - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 9) Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan
 - 1) Program Keluarga Berencana
 - a. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dari target visitasi ke faskes 32 kali terealisasi 52 kali
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari target peserta KB IUD yang terlayani sejumlah 1040 Orang terealisasi 1188 Orang

Adapun gambaran pencapaian target Rencana Strategis berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1:

2	08	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	10 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
2	08	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	08	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	08	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	08	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	08	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2 dokumen	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
2	08	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu								
2	08	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 dokumen	14 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	100%	26 dokumen	26 dokumen	100%
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1040 Orang /bulan	528 orang	1052 kali	1052 kali	100%	1040 Orang /bulan	1040 Orang/bulan	100%
2	08	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	08	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	100%	50 Laporan	50 Laporan	100%

2	08	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	50 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	100%
2	08	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	100%	100%	100%	100%	24 Paket	24 Paket	100%
2	08	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	205 Paket	100%	100%	100%	100%	205 Paket	205 Paket	100%
2	08	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	16 galon, 13 dus. Mamin 200 kotak	17 galon, 9 dus. Mamin 920 kotak	17 galon, 9 dus. Mamin 920 kotak	100%	20 Paket	20 Paket	100%
2	08	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang digandakan	16000 lembar	15392 lembar	12224 lembar	12224 lembar	100%	16000 lembar	16000 lembar	100%
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	200 Paket	4 eksemplar	10 lembar, 29 kali iklan	10 lembar, 29 kali iklan	100%	200 Paket	200 Paket	100%
2	08	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2 eksemplar	605 eksemplar	605 eksemplar	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	08	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 Laporan	24 kali dalam daerah, 15 kali luar daerah	35 kali dalam daerah, 30 kali luar daerah	35 kali dalam daerah, 30 kali luar daerah	100%	57 Laporan	57 Laporan	100%
						Jumlah mamin rapat SKPD yang disediakan	150 kotak	-	-	-	-	150 kotak	150 kotak	100%
2	08	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	7 unit	7 unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%

2	08	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	12 kali	-	-	-	-	12 kali	12 kali	100%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	100%	60 Laporan	60 Laporan	100%
2	08	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19 jenis	369 buah	369 buah	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
						Jumlah Jasa Operator yang dibayar	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
						Jumlah Jasa Tenaga Keamanan yang dibayar	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
2	08	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	160 Laporan	56 laporan	84 laporan	84 laporan	100%	160 Laporan	160 Laporan	100%
						Jumlah materai yang dibeli	700 lembar	-	-	-	-	700 lembar	700 lembar	100%
2	08	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140 Unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	140 Unit	140 Unit	100%
2	08	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	17 unit	97 kali	97 kali	100%	40 Unit	40 Unit	100%
2	08	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 kali	12 kali	12 kali	100%	12 Unit	12 Unit	100%
						Jumlah jasa petugas keamanan yg dibayar	0	12 bulan	12 kali	12 kali	100%	0	0	0

2	08	002			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD	25 %	40%	20%	10.24%	51%	25 %	25 %	100%
						Persentase partisipasi perempuan di sektor pembangunan	89.55 %	83.98%	89.40%	84%	93.94%	89.55 %	89.55 %	100%
2	08	002	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	002	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	18 kali	-	9 kali	9 kali	100%	18 kali	18 kali	100%
						Jumlah rapat koordinasi pokja PUG yang dilaksanakan	6 kali	4 kali	-	-	-	6 kali	6 kali	100%
						Jumlah rapat persiapan evaluasi APE yang dilaksanakan	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	100%
						Jumlah rapat Tim pokja PUG yang dilaksanakan	3 kali	-	-	-	-	3 kali	3 kali	100%
2	08	003			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2:100.000 rasio	88,89%	100%	96,79%	0.9679	2:100.000 rasio	2:100.000 rasio	100%
2	08	003	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
2	08	003	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%

					Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	4 kali	9 kali	9 kali	9 kali	100%	4 kali	4 kali	100%	
					Jumlah media KIE yang diadakan	250 lembar	-	-	-	-	250 lembar	250 lembar	100%	
					Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang diadakan	250 orang	-	488 orang	488 orang	100%	250 orang	250 orang	100%	
					Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan kebijakan perlindungan perempuan yang dilaksanakan	100 orang	-	50 orang	50 orang	100%	100 orang	100 orang	100%	
					Jumlah peserta sosialisasi UU PKDRT	50 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	100%	
					Jumlah peserta yang mengikuti monev kelompok GSI			150 orang	150 orang	100%				
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	100 orang	468 orang	-	-	-	100 orang	100 orang	100%	
					Jumlah rapat koordinasi lintas sektor yang diadakan	15 kali	-	1 kali	1 kali	100%	15 kali	15 kali	100%	
					Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	19 kali	-	1 kali	1kali	100%	19 kali	19 kali	100%	
2	08	003	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	003	2.02	001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi	20 kali	8 kasus	-	-	-	20 kali	20 kali	100%
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang	8 oarng	-	-	-	20 Orang	20 Orang	100%	
					Jumlah rapat mediasi dan diversi yang dilaksanakan	13 kali	8 kali	-	-	-	13 kali	13 kali	100%	
					Jumlah rapat mediasi yang dilaksanakan	6 kali	-	-	-	-	6 kali	6 kali	100%	

						Jumlah sembako yang diberikan kepada korban kekerasan	20 paket	-	10 paket	10 paket	100%	20 paket	20 paket	100%
2	08	003	2.02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penginapan bagi korban yang dilaksanakan	-	-	7	6	85.71%	-	-	-
						Jumlah visum et psiatrikum yang dilaksanakan	-	15 kali	32 kali	32 kali	100%	-	-	-
						Jumlah visum et repertum yang dilaksanakan	-	-	19 kali	19 kali	100%	-	-	-
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	20 kali	-	-	-	-	20 kali	20 kali	100%
2	08	003	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan / Pusat Pelayanan Terpadu yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	003	2.03	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	-	4 kali	-	-	-	-	-	-
						Jumlah peserta pelatihan manajemen kasus	-	-	45 orang	45 orang	100%	-	-	-
						Jumlah sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan kab/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	50 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	100%
2	08	004			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif	100 %	99,62%				100 %	100 %	100 %

2	08	004	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) yang sesuai standart												
2	08	004	2.02	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibentuk sesuai standart	1 lembaga	-	-	-	-	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga				
						Jumlah monitoring, evaluasi, koordinasi dan konsultasi terkait peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG	12 kali	-	-	-	-	12 kali	12 kali	12 kali				
						Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	-	-	-	-	7 Orang	7 Orang	7 Orang				
2	08	004	2.02	003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah APE yang dibeli/diadakan	6 paket	-	5 paket	5 paket	100%	6 paket	6 paket	6 paket				
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
						Jumlah doorprize hari anak yang dibeli	200 paket	-	-	-	-	200 paket	200 paket	200 paket				
						Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	8 kegiatan		8 kegiatan	8 kegiatan	100%	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan				
						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	2 kali					2 kali	2 kali	2 kali				
						Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kab/kota yang mendapat pelatihan	3 organisasi		3 organisasi	3 organisasi	100%	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi				
						Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	2 unit	3 paket	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit				

					Jumlah paket sembako yang disediakan untuk bhaksos	65 paket		270 paket	270 paket	100%	65 paket	65 paket	65 paket	
					Jumlah rapat rutin yang dilaksanakan	30 kali	25 kali	30 kali	30 kali	100%	30 kali	30 kali	30 kali	
					Jumlah seragam organisasi wanita yang dibeli	100 stel	-	49 stel	40 stel	100%	100 stel	100 stel	100 stel	
2	08	005			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak	100 %				100 %	100 %	100 %	
2	08	005	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Gender dan Anak yang disusun tepat waktu	100%	0	0	0	0%	100%	100%	100%
2	08	005	2.01	002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
						Jumlah frekwensi data gender dan anak yang dimanfaatkan	12 kali	-	-	-	-	12 kali	12 kali	12 kali
2	08	006			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pembangunan sektoral berbasis ramah anak yang sesuai standart	77 %	-	-	-	-	77 %	77 %	77 %
2	08	006	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendukung Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	006	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	2 kali		2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	2 kali
						Jumlah koordinasi lembaga layanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) ramah anak sesuai standart	3 kali	-	-	-	-	3 kali	3 kali	3 kali
						Jumlah koordinasi sekolah ramah anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs)sesuai standart	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	2 kali

					Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10 kali		2 kali	2 kali	100%	10 kali	10 kali	10 kali	
					Jumlah peserta koordinasi dan sosialisasi lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standart	30 orang	-	-	-	-	30 orang	30 orang	30 orang	
					Jumlah peserta koordinasi dan sosialisasi ruang bermain ramah anak (RBRA) sesuai standart	50 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	50 orang	
					Jumlah peserta pemantapan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan	50 orang	-	40 orang	40 orang	100%	50 orang	50 orang	50 orang	
					Jumlah peserta sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA)	50 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	50 orang	
2	08	007			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai standart	100 %	89,10%			100 %	100 %	100 %	
2	08	007	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan								
2	08	007	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
						Jumlah media KIE tentang pencegahan kekerasan bagi anak yang diadakan	100 lembar	-	1400 lembar	1400 lembar	100%	100 lembar	100 lembar	100 lembar
						Jumlah peserta koordinasi lintas ektor tentang pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan	15 orang	-	40 orang	40 orang	100%	15 orang	15 orang	15 orang
						Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	95 orang	-	30 orang	30 orang	100%	95 orang	95 orang	95 orang
						Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan di usia anak	200 orang	-	462 orang	462 orang	100%	200 orang	200 orang	200 orang

						Jumlah peserta sosialisasi pengasuhan bagi orang tua anak disabilitas yang dilaksanakan	2 kali	-	60 orang	60 orang	100%	2 kali	2 kali	2 kali
2	08	007	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	007	2.02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	15 layanan	-	-	-	-	15 layanan	15 layanan	100%
2	08	007	2.02	003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
						Jumlah kegiatan isbad nikah dilaksanakan	5 kali	-	-	-	-	5 kali	5 kali	5 kali
						Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 kali	29 kali	6 kali	6 kali	100%	3 kali	3 kali	3 kali
						Jumlah peserta rapat koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan	50 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	50 orang
						Jumlah sosialisasi kepada lembaga pengasuhan anak	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	4 kali
2	08	007	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	007	2.03	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/koa	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%

2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2	14	002			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Data Keluarga yang valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	14	002	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	14	002	2.02	009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah data hasil pemutakhiran data keluarga yang tersedia	-	-	1 data	1 data	100%	-	-	-
						Jumlah data keluarga yang tersedia	-	-	1 data	1 data	100%	-	-	-
						Jumlah data pelayanan kontrasepsi yang tersedia	-	-	1 data	1 data	100%	-	-	-
						Jumlah money yang dilaksanakan/diadakan	-	-	19 kali	19 kali	100%	-	-	-
2	14	002	2.02	011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokume n
						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	6 kali	-				6 kali	6 kali	6 kali
						Jumlah money yang dilaksanakan/diadakan	19 kali	-	19 kali	19 kali	100%	19 kali	19 kali	19 kali
						Jumlah pertemuan yang dilaksanakan/diadakan	4 kali	-	23 kali	23 kali	100%	4 kali	4 kali	4 kali
						Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pertemuan	160 orang	-	-	-	-	160 orang	160 orang	160 orang
2	14	002	2.02	012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
2	14	002	2.02	013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Balai Penyuluh KB yang mendapat langganan internet	19 Balai	-	-	-	-	19 Balai	19 Balai	100%
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%
						Jumlah Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	12 kali	-	-	-	-	12 kali	12 kali	100%

2	14	003			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	66.7 %	97,32%				66.7 %	66.7 %	66.7 %
						Rasio PKB	1:2 Rasio					1:2 Rasio	1:2 Rasio	1:2 Rasio
2	14	003	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase lembaga mitra yang mendukung program KKBPK								
2	14	003	2.01	001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah sosialisasi percepatan program bangga kencana yang dilaksanakan		-	60 kali	60 kali	100%	-	-	-
						Jumlah peserta sosialisasi advokasi program bangga kencana	150 orang	-	45 orang	45 orang	100%	150 orang	150 orang	100%
						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	18 kali	4 kali	-	-	-	18 kali	18 kali	100%
						Jumlah peserta pertemuan koordinasi kemitraan tingkat kabupaten dalam mendukung program bangga kencana	720 orang	-	-	-	-	720 orang	720 orang	100%
						Jumlah Stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengolahan program KKBPK	29 mitra	-	-	-	-	29 mitra	29 mitra	100%
2	14	003	2.01	004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	19 kali	-	-	-	-	19 kali	19 kali	19 kali
						Jumlah penyuluhan program KKBPK	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	2 kali
						Jumlah perbaikan media KIE yang dilaksanakan	2 kali	-	16 kali	16 kali	100%	2 kali	2 kali	2 kali
						Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media elektronik/radio yang diadakan	5 paket	-	3 paket	3 paket	100%	5 paket	5 paket	5 paket
						Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media luar ruangan/baliho yang diadakan	2 paket	-				2 paket	2 paket	2 paket

					Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media luar ruangan yang dilaksanakan	5 kali	-				5 kali	5 kali	5 kali	
					Jumlah promosi KIE program KKBPK melalui media cetak yang diadakan	500 lembar	-	710 lembar	710 lembar	100%	500 lembar	500 lembar	500 lembar	
2	14	003	2.01	006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah pelaksanaan rakorcama, rakordes dan minilok di masing-masing Balai Penyuluh KB yang tepat waktu	38 kali	-	228 kali	228 kali	100%	38 kali	38 kali	100%
2	14	003	2.01	007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah dukungan operasional yang diberikan kepada Balai Penyuluh KB	228 kali	-	19 kali	19 kali	100%	228 kali	228 kali	100%
						Jumlah orientasi lini lapangan yang dilaksanakan	19 kali	3 kali	76 kali	76 kali	100%	19 kali	19 kali	100%
						Jumlah pembinaan kader yang dilaksanakan oleh penyuluh KB Kecamatan	19 kali	3 kali	76 kali	76 kali	100%	19 kali	19 kali	100%
						Jumlah pengelolaan dan pemanfaatan data informasi melalui balai penyuluhan KB Kecamatan	5 kali	-	228 kali	228 kali	100%	5 kali	5 kali	100%
2	14	003	2.01	008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah monev operasional BOKB bagi Balai Penyuluhan KB Kecamatan	19 kali	-	19 kali	19 kali	100%	19 kali	19 kali	100%
						Jumlah pertemuan koordinasi antara OPD KB dengan penyuluh KB Kecamatan	6 kali	-	6 kali	6 kali	100%	6 kali	6 kali	100%
						Jumlah sosialisasi dan koordinasi program KKBPK	3 kali	-	3 kali	3 kali	100%	3 kali	3 kali	100%
2	14	003	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berkualitas dan terampil dalam melaksanakan Program Bangga Kencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	14	003	2.02	001	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah IMP yang dibina oleh PKB/PLKB	1528 orang	-	-	-	-	1528 orang	1528 orang	100%

2	14	003	2.03	001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah dokumen laporan reporting dan recording (r/r) pelayanan KB dan Pembinaan ber-KB yang dianalisa	12 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100%
						Jumlah Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	24 faskes	-	24 faskes	24 faskes	100%	24 faskes	24 faskes	100%
						Jumlah faskes yang terpenuhi kebutuhan Alokon dalam setahun	24 faskes	-	24 faskes	24 faskes	100%	24 faskes	24 faskes	100%
						Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	100%
						Jumlah pertemuan stockopname di gudang Alokon beserta Faskes	4 kali	-	4 kali	4 kali	100%	4 kali	4 kali	100%
						Jumlah visitasi ke Faskes yang sudah teregistrasi melalui aplikasi Siga	32 kali	-	32 kali	32 kali	100%	32 kali	32 kali	100%
						2	14	003	2.03	003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB Implant yang terlayani	380 orang	-
Jumlah peserta KB IUD yang terlayani	950 orang	-	1040 orang	1040 orang	100%							950 orang	950 orang	100%
Jumlah peserta KB MOP yang terlayani	3 orang	-	6 orang	0	0							3 orang	3 orang	100%
Jumlah peserta KB MOW yang terlayani	30 orang	-	150 orang	150 orang	100%							30 orang	30 orang	100%
Jumlah peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	97.418 orang	-	-	-	-							97.418 orang	97.418 orang	100%
Jumlah kesertaan KB di Kab/Kota dengan kesertaan rendah	0 orang	-	-	-	-							0 orang	0 orang	100%
Jumlah kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	2507 orang	-	-	-	-							2507 orang	2507 orang	100%
Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1200 orang	300 orang	-	-	-							1200 orang	1200 orang	100%
2	14	003	2.03	006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah BP yang direhab	4 BP	1 unit	3 unit	0	0	4 BP	4 BP	100%

					Jumlah kendaraan roda dua yang dibeli	25 unit	-	-	-	-	25 unit	25 unit	100%	
2	14	003	2.03	007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	19 kali		3 kali	3 kali	100%	19 kali	19 kali	100%
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	150 Orang	300 orang	-	-	-	150 Orang	150 Orang	100%
						Jumlah Pelayanan KB Pasca Persalinan	750 kali	-	-	-	-	750 kali	750 kali	100%
						Jumlah pembinaan, pelayanan dan penggerakan KB bagi Faskes	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	100%
						Jumlah pembinaan pelayanan KB bagi akseptor KB	19 kali	-	-	-	-	19 kali	19 kali	100%
						Jumlah peserta pembinaan pasca pelayanan bagi akseptor KB	0 orang	-	60 orang	60 orang	100%	0 orang	0 orang	100%
						Jumlah peserta pembinaan pelayanan KB	285 orang	-	-	-	-	285 orang	285 orang	100%
2	14	003	2.03	008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%
						Jumlah promosi dan konseling Kespro dan hak-hak reproduksi di Faskes dan Poktan	10 kali	-	6 kali	6 kali	100%	10 kali	10 kali	100%
						Jumlah Sosialisasi Pelayanan KB dan Kespro di Faskes dan jejaringnya	6 kali	-	2 kali	2 kali	100%	6 kali	6 kali	100%
2	14	003	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase organisasi masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	14	003	2.04	002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%

2	14	003	2.04	003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah laporan perkembangan Kampung KB melalui aplikasi	19 laporan	-	-	-	-	19 laporan	19 laporan	100%
						Jumlah Orientasi lini lapangan di Kampung KB yang dilaksanakan	19 kali	-	-	-	-	19 kali	19 kali	100%
						Jumlah pertemuan kelompok kegiatan Kampung KB yang dilaksanakan	19 kai	-	400 kali	400 kali	100%	19 kai	19 kai	100%
						Jumlah pertemuan pokja Kampung KB yang dilaksanakan	19 kali	5 kali	300 kali	300 kali	100%	19 kali	19 kali	100%
2	14	004			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	72 %					72 %	72 %	100%
						Persentase kelompok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera yang di intervensi	100 %	100%				100 %	100 %	100%
2	14	004	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	14	004	2.01	002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana BKB KIT Stunting yang diadakan	20 paket	9 pkaet	10 paket	10 paket	100%	20 paket	20 paket	100%
						Jumlah sarana KIE KIT Siap Nikah anti stunting yang diadakan	-	10 paket	10 paket	10 paket	100%	-	-	-
2	14	004	2.01	003	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengelola yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga	320 orang	-	-	-	-	320 orang	320 orang	100%
2	14	004	2.01	005	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Calon Pengantin di desa yang mendapat pendampingan	-	-	13122 orang	13122 orang	100%	-	-	-
						Jumlah ibu hamil di desa yang mendapat pendampingan	-	-	87616 orang	87616 orang	100%	-	-	-
						Jumlah ibu Bersalin Pasca Persalinan di desa yang mendapat pendampingan	-	-	21904 orang	21904 orang	100%	-	-	-

					Jumlah Surveillance stunting tingkat desa	-	-	36 kali	36 kali	100%	-	-	-	
					Jumlah pendamping keluarga yang melakukan pencatatan hasil pemantauan pendampingansasaran beresiko stunting	20.100 orang					-	-	-	
					Jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang melakukan pendampingan sasaran catin, keluarga beresiko stunting	6700 tim					-	-	-	
2	14	004	2.01	006	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pertemuan edukasi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dalam penanggulangan stunting	19 kali	6 kali	-	-	-	19 kali	19 kali	100%
						Jumlah pertemuan kespro stunting bagi calon pengantin	19 kali	7 kali	-	-	-	19 kali	19 kali	100%
2	14	004	2.01	007	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan yang teregistrasi dalam aplikasi	19 kelompok	-	-	-	19 kelompok	19 kelompok	100%	
						Jumlah MoU/Kerjasama antara organisasi pemerintahan desa dengan OPD KB	10 dokumen	-	-	-	-	10 dokumen	10 dokumen	100%
						Jumlah pertemuan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dilaksanakan	19 kali	-	-	-	-	19 kali	19 kali	100%
						Jumlah evaluasi kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dilaksanakan	6 kali	-	-	-	-	6 kali	6 kali	100%
						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	19 kali	-	-	-	-	19 kali	19 kali	100%
						Jumlah peserta pelatihan kelompok BKB program prioritas nasional yang dilaksanakan	380 orang	-	-	-	-	380 orang	380 orang	100%
						Jumlah peserta pelatihan kelompok BKL yang dilaksanakan	80 orang	-	-	-	-	80 orang	80 orang	100%

						Jumlah ketua kelompok BKB yang menerima teflon	275 orang	-	-	-	-	275 orang	275 orang	100%
2	14	004	2.01	008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	19 kali	-	-	-	-	19 kali	19 kali	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kab/Kota bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi mengampu 2 (dua) urusan yaitu :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat serta mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal, dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.

Sedangkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah dengan indikator Hasil LHE AKIP Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak
4. Terkendalinya kelahiran penduduk

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal, maupun terhadap Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2020 bahwa untuk urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah ditetapkan indikator kinerja kunci keluaran berupa outcome yaitu :

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD
2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota
3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
4. TFR (Angka Kelahiran Total)
5. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
6. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Untuk mengetahui secara jelas pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel 2.2.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Tingkat kinerja pelayanan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi pada Tahun 2022 sudah tergolong baik, walaupun apabila dilihat berdasarkan target Indikator Kinerja Program masih jauh dari harapan, dimana realisasi dari target tersebut hanya mencapai angka 97,99%. Pada urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak keberhasilan capaian indikator kinerja untuk perolehan penghargaan Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan Komitmen Percepatan Pengarusutamaan Gender Terbaik dan Kabupaten Layak Anak mendapat penghargaan Peringkat Pratama serta Daerah Responsif Terhadap Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana capaian drop out KB dan Unmet Need juga masih relatif tinggi, hal ini disebabkan karena beberapa hal, salah satunya adalah berkurangnya anggaran penggerakan dari APBN sehingga sehingga untuk pelayanan dengan APBD terbatas. Untuk hal lain adalah kurang tepatnya intervensi program kegiatan OPD untuk menangani masalah di lapangan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 2. Kurang tercukupinya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 3. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia sehingga pencapaian kinerja belum optimal.
- b. Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 1. Indeks Pembangunan Gender meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 2. Indeks Pemberdayaan Gender relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 3. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.
 4. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 5. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
 6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Pengarusutamaan Gender Belum semua program kegiatan menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
 7. Kurangnya petunjuk pelaksanaan di masing-masing stake holder tentang pengarusutamaan gender

8. Kurangnya sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang pentingnya pengarusutamaan gender
 9. Belum adanya Standart Operasional Prosedur responsif gender
 10. Kurangnya koordinasi dalam perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender antar lembaga
 11. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pemberdayaan perempuan
 12. Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang belum terlapor
 13. Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga
 14. Masih adanya anggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebuah aib keluarga sehingga enggan untuk melaporkan
 15. Kurang optimalnya peran kelembagaan dalam upaya penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 16. Belum adanya kewenangan kecamatan dalam fasilitasi penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 17. Kurangnya Penyediaan Sarana dan Prasarana layanan bagi korban kekerasan yang tersedia
 18. Masih lemahnya Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan anak
 19. Masih lemahnya jejaring penyedia peningkatan kualitas keluarga
 20. Belum adanya Dokumen data Gender dan Anak yang tersedia
 21. Data Gender dan Anak belum dimanfaatkan secara maksimal
 22. Kurangnya partisipasi stakeholder dalam penanganan anak bekerja di bawah umur
 23. Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
 24. Kurangnya sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi Perlindungan Khusus Anak
 25. Kurangnya pemenuhan hak anak sehingga terjadi berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak usia dini, dan anak berhadapan dengan hukum
 26. Belum semua fasilitas umum masuk kategori fasilitas yang ramah anak
 27. Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri tentang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak masih belum optimal.
- c. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Program Bangga Kencana, antara lain :
1. Masih rendahnya kualitas pemahaman masyarakat tentang program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana
 2. Masih kurangnya kualitas sosialisasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program bangga Kencana di masyarakat
 3. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana di tingkat desa
 4. Belum adanya evaluasi yang sesuai standart terhadap Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program bangga kencana

5. Kurangnya kelengkapan sarpras di Balai Penyuluh Keluarga Berencana
6. Belum tercapainya Standart Pelayanan Minimal Program Bangga Kencana
7. Adanya fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan yang belum optimal
8. Banyaknya sarana pendukung operasional Penyuluh Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang tidak sesuai standart
9. Belum tercapainya Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa melakukan kegiatan Program Bangga Kencana sesuai target
10. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
11. Belum semua Faskes melayani Keluarga Berencana Metoda Operasi Wanita dan Metoda Operasi Pria
12. Masih kurangnya kompetensi Petugas Logistik Alat obat dan kontrasepsi
13. Masih rendahnya pengguna Metode Kontrasepsi Jangka panjang
14. Masih kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi bagi kelompok kegiatan
15. Masih kurangnya dukungan organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja dalam pelaksanaan Pelayanan keluarga berencana dan Pembinaan Kesertaan berkeluarga berencana
16. Belum semua Linsek terlibat dalam pengelolaan Kampung Keluarga Berencana
17. Belum adanya standarisasi pendidikan kependudukan di sekolah formal dan normal
18. Kurangnya kompetensi tenaga penyuluh keluarga berencana
19. Penyediaan data dan informasi kependudukan yang belum maksimal
20. Masih kurangnya sarana kelompok kegiatan sesuai kebutuhan
21. Adanya sebagian kader kelompok kegiatan yang monoton dalam melakukan kegiatan
22. Belum optimalnya kerjasama yang dilakukan ttg kebijakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
23. Masih rendahnya kesertaan Keluarga Berencana pada sasaran khusus seperti Kesertaan Keluarga Berencana Pria, Pasangan Usia Subur dengan anak stunting, Pasangan Usia Subur miskin, dan Pasangan Usia Subur Risiko Tinggi empat terlalu. Capaian kesertaan Keluarga Berencana pria cenderung stagnan karena masih terbatas pelayanan vasektomi akibat dari masih terbatasnya dan belum meratanya tenaga yang mampu melayani, adanya mekanisme rujukan untuk pelayanan Keluarga Berencana termasuk pelayanan vasektomi di Rumah Sakit dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, serta masih terdapat pemahaman bahwa kontrasepsi merupakan urusan wanita.
24. Pasangan Usia Subur yang dengan anak stunting dapat disebabkan karena risiko empat terlalu, dan Pasangan Usia Subur miskin juga berisiko melahirkan anak stunting karena keterbatasan asupan gizi pada ibu;
25. Belum optimalnya advokasi kebijakan pengendalian penduduk yang telah diupayakan kepada pemerintah daerah dan sektor;

26. Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga melalui peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-Keluarga Berencana;
27. Kelompok Kegiatan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-Keluarga Berencana/pelestarian Peserta Keluarga Berencana Aktif;
28. Belum optimalnya distribusi materi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, perawatan remaja, maupun lansia;
29. Belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mengangkat perekonomian keluarga peserta Keluarga Berencana;
30. Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang Program Bangkacencana antara wilayah perdesaan- perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga;
31. Muatan dan pesan dalam advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi masih perlu untuk terus dikembangkan;
32. Peran tenaga lapangan Keluarga Berencana dalam konseling Keluarga Berencana belum optimal.
33. Sistem pengelolaan data yang masih belum banyak dipahami oleh petugas lapangan;
34. Fasilitasi pengelolaan data di lini lapangan yang masih belum optimal;
35. Masih adanya balita stunting di daerah tertentu yang membutuhkan penanganan khusus dari semua stakeholder

Untuk Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah :

VISI :

“SEMESTA BERENCANA“ Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”.

MISI :

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintah guna memberikan pelayanan prima
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong royong.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi adalah Misi 1 dan 2, yaitu:

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>MISI I : Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Kemudahan terhadap Akses Pelayanan kepada Masyarakat</p> <p>Tujuan 1 Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia Sasaran Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. 2. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga. 3. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 4. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. 5. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya 2. Kurangnya keterlibatan semua pihak dalam penanganan kasus perempuan korban kekerasan 3. Kurangnya kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Pembangunan Ekonomi, dan Politik 2. Adanya Koordinasi dan Mendorong Upaya upaya Perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan 3. Advokasi kepada pemerintah, masyarakat, tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya

		<p>6. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum</p> <p>7. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.</p>		
2	<p>Misi 2 : Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.</p> <p>Tujuan 2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan social ekonomi masyarakat</p> <p>sasaran 2.1 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk</p>	<p>1. Masih adanya putus pakai kontrasepsi dan kehamilan yang tidak diinginkan.</p> <p>2. Masih rendahnya kesertaan Keluarga Berencana pada sasaran khusus seperti kesertaan Keluarga Berencana pria, Pasangan Usia Subur dengan anak stunting, Pasangan Usia Subur miskin, dan Pasangan Usia Subur resiko tinggi 4 (empat) terlalu.</p> <p>3. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian peserta Keluarga Berencana.</p> <p>4. Masih adanya angka kematian ibu dan bayi</p> <p>5. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern</p> <p>6. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga</p> <p>7. Masih adanya kebutuhan ber-Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur yang belum terlayani</p> <p>8. Masih adanya kasus pernikahan di usia anak</p> <p>9. Masih adanya balita stunting di setiap wilayah</p>	<p>1. Belum optimalnya akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran</p> <p>2. Angka prevalensi peserta Keluarga Berencana aktif belum maksimal</p> <p>3. Belum semua orang tua peduli terhadap pemenuhan gizi anak dan tumbuh kembang anak</p>	<p>1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja</p> <p>2. Penguatan jejaring dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi</p> <p>3. Penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi Program Bangga Kencana serta konseling keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif</p>

Isu Strategis Global

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SDGs (TUJUAN 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional.	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan Terbatasnya Akses Sumber Daya dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 	
2	SDGs (TUJUAN 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan orang dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender disemua sector pembangunan 	

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> • Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan • Menyadari dan menghargai pelayanandan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama didalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional • Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik • Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk property lainnya pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional • Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan • Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakkan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurang lengkapnya penyusunan data terpilah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah • Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsive Gender kedalam perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender • Banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang Bias Gender • Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak • Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sector dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang 	
	SDGs (TUJUAN 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor Keluarga Berencana bagi kaum laki-laki • Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Keluarga Berencana Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang • Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi. • Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana 	

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
 - b. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative, lembaga pemerintahan dan sector profesional
 - c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
 - d. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
 - f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
 - g. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
 - h. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
 - i. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Program Bangga Kencana, antara lain :
- a. Disparitas angka prevalensi kontrasepsi dan unmet need antar wilayah masih tinggi karena belum meratanya pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di semua wilayah;
 - b. Masih tingginya tingkat putus pakai kontrasepsi dan kehamilan yang tidak diinginkan;
 - c. Masih rendahnya kesertaan Keluarga Berencana pada sasaran khusus seperti Kesertaan Keluarga Berencana Pria, Pasangan Usia Subur dengan anak stunting, Pasangan Usia Subur miskin, dan Pasangan Usia Subur Risiko Tinggi empat terlalu. Capaian kesertaan keluarga berencana pria cenderung stagnan karena masih terbatas pelayanan vasektomi akibat dari karena masih terbatasnya dan belum meratanya tenaga yang mampu melayani, adanya mekanisme rujukan untuk pelayanan keluarga berencana termasuk pelayanan vasektomi di Rumah Sakit dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, serta masih terdapat pemahaman bahwa kontrasepsi merupakan urusan wanita. Pasangan Usia Subur yang dengan anak stunting dapat disebabkan karena risiko empat terlalu, dan Pasangan Usia Subur miskin juga berisiko melahirkan anak stunting karena keterbatasan asupan gizi pada ibu;
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan pembiayaan pelayanan Keluarga Berencana melalui mekanisme jaminan kesehatan.
 - e. Kurang optimalnya pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit terutama sejak diberlakukannya program jaminan kesehatan karena adanya mekanisme rujukan berjenjang sehingga Rumah Sakit tidak dapat langsung melayani Keluarga Berencana tanpa ada rujukan dari faskes dibawahnya, serta masih adanya hambatan terkait pembiayaan pelayanan Keluarga Berencana pada pascapersalinan di Rumah Sakit;

- f. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, perilaku berisiko, dan pendidikan seksual pada remaja dan Pasangan Usia Subur;
- g. Fokus pembangunan daerah yang bervariasi serta dampak dari pelaksanaan pembangunan kependudukan yang tidak dapat dirasakan dalam waktu dekat menjadikan isu dan program-program pengendalian penduduk belum masuk dalam sasaran strategis pemerintah daerah;
- h. Kurikulum pendidikan nasional belum memasukkan pendidikan kependudukan sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran nasional yang dijalankan;
- i. Rendahnya pemahaman dampak kependudukan para pemangku kepentingan dan masyarakat;
- j. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- k. Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (generasi milenial dan generasi zilenial);
- l. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga;
- m. Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi;
- n. Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah;
- o. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia;
- p. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga; dan masih terjadi disintegrasi bidang pembangunan keluarga lintas sector;
- q. Belum seluruh keluarga akseptor Keluarga Berencana Lestari Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan akseptor Keluarga Berencana Mandiri Metode Kontrasepsi Jangka Panjang memiliki kemandirian secara ekonomi.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Peluang terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
 - b. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
 - c. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

- d. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Peluang terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana yang ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu : 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana, 3) Keluarga Sejahtera, dan 4) Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan Program Keluarga Berencana di tingkat pusat dan Kabupaten/Kota.
 - Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan Pembangunan Nasional.
 - Adanya peran sektor swasta, khususnya dalam meningkatkan upaya kesertaan ber-Keluarga Berencana masyarakat.

Formulasi isu-isu penting, rekomendasi, catatan strategis untuk ditindaklanjuti Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun sarannya yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan
Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Capaian Indeks Pembangunan Gender	Kesetaraan gender merupakan permasalahan lintas sector yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender untuk meningkatkan akses partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun Pengarusutamaan Gender belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Pemahaman terhadap gender dan Pengarusutamaan Gender belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	<ul style="list-style-type: none"> - Pengarusutamaan Gender merupakan startegi dalam Kebijakan Pembangunan di Jatim - Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam Pengarusutamaan Gender
		Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	Adanya peraturan provinsi tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah, tentang kebijakan satu data provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Meningkatnya Capaian Indeks Pemberdayaan Gender	Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif
		Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan lembaga legislative
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan - Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak-anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4	Meningkatnya Kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang	Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal	Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani perlindungan anak dan perempuan
5	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabkota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	- Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam Pemenuhan Hak Anak

Sedangkan sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Adapun sasaran BKKBN yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018)	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Keluarga Berencana Pasca salin Metode Konsumsi Jangka Panjang	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah
2	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi			
3	Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Dalam menyusun rencana kerja tahunan berpijak pada kebijakan pemerintah Kabupaten Ngawi secara umum yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi yang teknis operasional perencanaan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang diselaraskan antara perencanaan program kegiatan secara umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan perencanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.

Dalam melaksanakan review Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah yang banyak terdapat perbedaan antara lain :

- Besarnya dana dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan realisasinya tidak sesuai.
- Adanya rumusan program dan kegiatan baru yang dibutuhkan dalam perangkat daerah yang tidak terdapat di Rencana Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi. Proses perbandingan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana usulan Organisasi Perangkat Daerah dapat tertampung baik dari jumlah kegiatan maupun besarnya dana yang diberikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN NGAWI

Nama PD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CA TA TA N PE NT IN G
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				18,518,580,024	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6,958,209,455	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,719,246,700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,608,209,455	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				47,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14,303,500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	5,271,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	7,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1,070,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1,070,000	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,302,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1,590,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB.NGA WI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	7,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB.NG AWI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,858,746,700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,904,015,893.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB.NGA WI	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 dokumen	4,892,183,423	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB.NG AWI	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 dokumen	4,898,015,893.00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1040 Orang /bulan				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1040 Orang/ bulan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB.NGA WI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB.NG AWI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KAB.NGA WI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KAB.NG AWI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan	3,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				45,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				37,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KAB.NGA WI	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket	20,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KAB.NG AWI	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	12,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KAB.NGA WI	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	25,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KAB.NG AWI	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	25,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				199,500,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				200,386,410	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KAB.NGA WI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	5,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KAB.NG AWI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	4,893,410	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB.NGA WI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	205 Paket	45,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB.NG AWI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	205 Paket	30,000,000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB.NGA WI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	27,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB.NG AWI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	10,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB.NGA WI	Jumlah barang yang digandakan	16000 lembar	45,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB.NG AWI	Jumlah barang yang digandakan	16000 lembar	12,002,000	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	200 Paket				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	200 Paket		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	27,780,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB.NGA WI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	95 Laporan	5,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB.NG AWI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	5,520,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB.NGA WI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 Laporan	60,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB.NG AWI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 Laporan	110,191,000	
			Jumlah mamin rapat SKPD yang disediakan	150 kotak					Jumlah mamin rapat SKPD yang disediakan		150 kotak
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				215,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				146,302,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB.NGA WI	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	115,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB.NG AWI	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit		
	Pengadaan Mebel	KAB.NGA WI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	25,000,000	Pengadaan Mebel	KAB.NG AWI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	99,979,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB.NGA WI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB.NG AWI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	46,323,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				236,700,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				217,131,652	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB.NGA WI	Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	12 kali	96,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB.NG AWI	Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	12 kali	85,784,152	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		60 Laporan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB.NGA WI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50,700,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB.NG AWI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	39,987,500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB.NGA WI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	160 Laporan	90,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB.NG AWI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	160 Laporan	91,360,000	
			Jumlah materai yang dibeli	700 lembar					Jumlah materai yang dibeli		700 lembar

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				116,800,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				89,070,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB.NGA WI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB.NG AWI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB.NGA WI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140 Unit	75,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB.NG AWI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	50,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB.NGA WI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	21,800,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB.NG AWI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	14,070,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KAB.NGA WI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KAB.NG AWI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	25,000,000	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD	25 %	451,713,000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD	25 %	110,000,000	
Persentase partisipasi perempuan di sektor pembangunan			89.55 %	Persentase partisipasi perempuan di sektor pembangunan				89.55 %			
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				302,120,000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				110,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	
Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG yang dirumuskan			1 kali	Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG yang dirumuskan							
Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota			141 kegiatan	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110,000,000	
Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan			18 kali	Jumlah peserta yang mengikuti rapat APE				70 orang			
Jumlah rapat koordinasi pokja PUG yang dilaksanakan			6 kali	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG				150 orang			

		Jumlah rapat persiapan evaluasi APE yang dilaksanakan	4 kali			Jumlah rapat persiapan evaluasi APE yang dilaksanakan	0		
		Jumlah rapat Tim pokja PUG yang dilaksanakan	3 kali			Jumlah rapat Tim pokja PUG yang dilaksanakan	0		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	KAB.NGA WI	Jumlah monev PPRG	19 kali	10,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	KAB.NG AWI	Jumlah monev PPRG		0
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	KAB.NGA WI	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kab/kota yang telah dilatih PUG	47 lembaga	42,120,000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	KAB.NG AWI	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kab/kota yang telah dilatih PUG		0
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Perangkat Daerah				Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	
		Jumlah peserta penguatan jejaring kinerja PUG yang dilaksanakan	150 orang				Jumlah peserta penguatan jejaring kinerja PUG yang dilaksanakan		
		Jumlah peserta sosialisasi PUG yang dilaksanakan	950 orang				Jumlah peserta sosialisasi PUG yang dilaksanakan		
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50,000,000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50,000,000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-
		Jumlah laporan hasil penyusunan SOP responsif gender yang disusun	1 dokumen				Jumlah laporan hasil penyusunan SOP responsif gender yang disusun		
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	50 orang				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi		
		Jumlah SOP responsif gender yang disusun	1 dokumen				Jumlah SOP responsif gender yang disusun		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				99,593,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0 Lembaga	10,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		0	-
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Lembaga				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah alat ketrampilan yang diadakan	50 buah	40,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah alat ketrampilan yang diadakan			-
		Jumlah kader perempuan tingkat kab/kota yang sudah dilatih	25 orang				Jumlah kader perempuan tingkat kab/kota yang sudah dilatih			-
		Jumlah koordinasi yang dilakukan	8 kali				Jumlah koordinasi yang dilakukan			-
		Jumlah perempuan kepala keluarga yang mengikuti pelatihan ketrampilan	50 orang				Jumlah perempuan kepala keluarga yang mengikuti pelatihan ketrampilan			-
		Jumlah peserta sosialisasi yang dilaksanakan/diadakan	50 orang				Jumlah peserta sosialisasi yang dilaksanakan/diadakan			-
		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5 Orang				Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			-
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	49,953,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		0	-
		Jumlah KIE Pemberdayaan Perempuan yang dibuat dan didistribusikan	500 lembar				Jumlah KIE Pemberdayaan Perempuan yang dibuat dan didistribusikan			-
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2:100 rasio	564,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2:100 rasio	150,000,000	-
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				90,000,000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				20,000,000	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000	-

		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi	1 dokumen				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUP	200 orang		-
		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	4 kali				Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan			-
		Jumlah media KIE yang diadakan	250 lembar				Jumlah media KIE yang diadakan			-
		Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang diadakan	250 orang				Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang diadakan			-
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan kebijakan perlindungan perempuan yang dilaksanakan	100 orang				Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan kebijakan perlindungan perempuan yang dilaksanakan			-
		Jumlah peserta sosialisasi UU PKDRT	50 orang				Jumlah peserta sosialisasi UU PKDRT			-
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	100 orang				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi			-
		Jumlah rapat koordinasi lintas sektor yang diadakan	15 kali				Jumlah rapat koordinasi lintas sektor yang diadakan			-
		Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	19 kali				Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan			-
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Perangkat Daerah	10,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			-
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan kebijakan perlindungan perempuan yang dilaksanakan	50 orang				Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan kebijakan perlindungan perempuan yang dilaksanakan			-
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				349,000,000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				130,000,000	-
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi	20 kali	224,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang	110,000,000	-

		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	200 orang		-	
		Jumlah rapat mediasi dan diversifikasi yang dilaksanakan	13 kali				Jumlah rapat mediasi dan diversifikasi yang dilaksanakan			-	
		Jumlah rapat mediasi yang dilaksanakan	6 kali				Jumlah rapat mediasi yang dilaksanakan			-	
		Jumlah sembako yang diberikan kepada korban kekerasan	20 paket				Jumlah sembako yang diberikan kepada korban kekerasan			-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	125,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	20,000,000	-
		Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi	6 kali				Jumlah jasa psikolog UPTD PPA yang dibayarkan	12 kali			-
		Jumlah penginapan bagi korban yang dilaksanakan	6 kali				Jumlah Talkshow melalui radio yang dilaksanakan	1 paket			-
		Jumlah visum et psiatrikum yang dilaksanakan	6 kali				Jumlah visum et psiatrikum yang dilaksanakan				-
		Jumlah visum et repertum yang dilaksanakan	6 kali				Jumlah visum et repertum yang dilaksanakan				-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				125,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	10 kali	65,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		0	-
		Jumlah peserta pelatihan manajemen kasus	50 orang				Jumlah peserta pelatihan manajemen kasus				-
		Jumlah rapat rutin yang dilaksanakan	2 kali				Jumlah rapat rutin yang dilaksanakan				-
		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang				Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				-
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-

		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	2 Kali				Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan			-
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	3 Lembaga				Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi			-
		Jumlah lembaga yang menjadi jejaring penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	3 Lembaga				Jumlah lembaga yang menjadi jejaring penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif			-
		Jumlah rapat rutin yang dilaksanakan	4 Kali				Jumlah rapat rutin yang dilaksanakan			-
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif	100 %	1,015,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif	100 %	420,000,000	-
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			550,000,000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	19 kali	300,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		-
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Perangkat Daerah				Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		-
			Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi yang memahami tentang kebijakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender	100 orang				Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi yang memahami tentang kebijakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender		-
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah alat ketrampilan yang dibeli	50 buah	250,000,000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah alat ketrampilan yang dibeli		-
			Jumlah bahan pelatihan ketrampilan yang dibeli	500 paket				Jumlah bahan pelatihan ketrampilan yang dibeli		-
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		-
			Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	5 kali				Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		-
			Jumlah pelatihan di masyarakat yang diadakan	10 kali				Jumlah pelatihan di masyarakat yang diadakan		-
			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan	500 orang				Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan		-

			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi P2WKSS	100 orang				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi P2WKSS			-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				485,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				420,000,000	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dibentuk sesuai standart	1 lembaga	65,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Puspa	288 orang	20,000,000	-
	Jumlah monitoring, evaluasi, koordinasi dan konsultasi terkait peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG		12 kali	Jumlah monitoring, evaluasi, koordinasi dan konsultasi terkait peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG				0	-		
	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		7 Orang	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	-		
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah APE yang dibeli/diadakan	6 paket	400,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400,000,000	-
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Jumlah peserta yang mengikuti rapat Pleno GOW				1320 Orang	-		
	Jumlah doorprise hari anak yang dibeli		200 paket	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Hari Kartini				180 Orang	-		
	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan		8 kegiatan	Jumlah peserta yang mengikuti Hari Jadi Kabupaten Ngawi				180 Orang	-		
	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		2 kali	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Hari Ibu				180 Orang	-		
	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kab/kota yang mendapat pelatihan		3 organisasi	Jumlah peserta yang mengikuti Pleno DWP				1400 Orang	-		
	Jumlah paket sembako yang disediakan untuk bhaksos		65 paket	Jumlah peserta yang mengikuti pleno GOPTKI				420 Orang	-		

		Jumlah rapat rutin yang dilaksanakan	30 kali				Jumlah rapat rutin yang dilaksanakan	0		-
		Jumlah seragam organisasi wanita yang dibeli	100 stel				Jumlah seragam organisasi wanita yang dibeli	0		-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak	100 %	150,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak	100 %	10,000,000	-
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150,000,000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10,000,000	-
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah data terpilah anak yang di data	5 data	75,000,000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	5,000,000	-
		Jumlah dokumen data gender anak yang tersedia	5 dokumen				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	3 kali		-
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen				Jumlah peserta rapat koordinasi yang dilaksanakan	0		-
		Jumlah peserta rapat koordinasi yang dilaksanakan	120 orang							-
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75,000,000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5,000,000	-
	KAB.NGA WI	Jumlah frekwensi data gender dan anak yang dimanfaatkan	12 kali				KAB.NG AWI	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan rapat		80 Orang
							Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	8 Orang		-
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Pembangunan sektoral berbasis ramah anak yang sesuai standart	77 %	170,000,000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Pembangunan sektoral berbasis ramah anak yang sesuai standart	77 %	210,000,000	-
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				120,000,000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				210,000,000	-
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah anggota forum anak di tingkat desa	450 orang	65,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan percepatan penurunan stunting	950 Orang	100,000,000	-
		Jumlah anggota forum anak yang difasilitasi	35 orang				Jumlah peserta yang mengikuti persiapan kegiatan percepatan penurunan stunting	45 Orang		-
		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	2 kali				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	18 kali		-

		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi				Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi		-
		Jumlah pembentukan forum anak di tingkat desa	45 kelompok				Jumlah pembentukan forum anak di tingkat desa	0		-
		Jumlah peserta sosialisasi KHA	50 orang				Jumlah peserta sosialisasi KHA	0		-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGAWI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGAWI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110,000,000	-
		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	2 kali				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	230 Orang		-
		Jumlah koordinasi lembaga layanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) ramah anak sesuai standart	3 kali				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	6 kali		-
		Jumlah koordinasi sekolah ramah anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs)sesuai standart	2 kali				Jumlah koordinasi sekolah ramah anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs)sesuai standart	0		-
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10 kali				Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	0		-
		Jumlah peserta koordinasi dan sosialisasi lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standart	30 orang				Jumlah peserta koordinasi dan sosialisasi lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standart	0		-
		Jumlah peserta koordinasi dan sosialisasi ruang bermain ramah anak (RBRA) sesuai standart	50 orang				Jumlah peserta koordinasi dan sosialisasi ruang bermain ramah anak (RBRA) sesuai standart	0		-
		Jumlah peserta pemantapan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan	50 orang				Jumlah peserta pemantapan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan	0		-
		Jumlah peserta sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA)	50 orang				Jumlah peserta sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA)	0		-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0	-

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-
		Jumlah peserta rapat evaluasi KLA	95 orang				Jumlah peserta rapat evaluasi KLA			-
		Jumlah petugas entri data KLA	18 orang				Jumlah petugas entri data KLA			-
		Jumlah rapat persiapan dan percepatan Kabupaten Layak Anak	2 kali				Jumlah rapat persiapan dan percepatan Kabupaten Layak Anak			-
		Jumlah Tim Gugus Tugas KLA yang melaksanakan kegiatan	13 orang				Jumlah Tim Gugus Tugas KLA yang melaksanakan kegiatan			-
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai standart	100 %	625,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai standart	100 %	40,000,000	-
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				700,000,000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				20,000,000	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	70,000,000	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	KAB.NG AWI	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	3 Kegiatan	20,000,000	Ha sil Pe mu tak hir an
		Jumlah media KIE tentang pencegahan kekerasan bagi anak yang diadakan	100 lembar				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	300 Orang		-
		Jumlah peserta koordinasi lintas ektor tentang pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan	15 orang				Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	8 kali		-
		Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	95 orang				Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	0		-
		Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan di usia anak	200 orang				Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan di usia anak	0		-
		Jumlah peserta sosialisasi pengasuhan bagi orang tua anak disabilitas yang dilaksanakan	2 kali				Jumlah peserta sosialisasi pengasuhan bagi orang tua anak disabilitas yang dilaksanakan	0		-

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				355,000,000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20,000,000	-
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	30,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		10,000,000	0
		Jumlah penyediaan penginapan bagi korban	3 kali				Jumlah penyediaan penginapan bagi korban			-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Layanan	125,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	KAB.NG AWI	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	15 Orang	10,000,000	Hasil Pe mu tak hir an
		Jumlah penyediaan penginapan bagi korban	15 kali				Jumlah Talkshow melalui radio yang dilaksanakan	1 paket		-
		Jumlah visum et psikiatrikum anak yang dilaksanakan	15 kali				Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	30 kali		-
		Jumlah visum et repertum yang dilaksanakan	15 kali				Jumlah visum et repertum yang dilaksanakan	15 kali		-
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	150,000,000	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	KAB.NG AWI	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	5 Dokumen	10,000,000	Hasil Pe mu tak hir an
		Jumlah KIE tentang perlindungan khusus anak yang dibuat	1200 lembar				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	120 Orang		-
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 kali				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	6 kali		-
		Jumlah peserta isbad nikah yang difasilitasi	90 pasang				Jumlah peserta isbad nikah yang difasilitasi	0		-
		Jumlah peserta rapat koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan	50 orang				Jumlah peserta rapat koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan	0		-

		Jumlah publikasi isbad nikah yang dilaksanakan	2 kali				Jumlah publikasi isbad nikah yang dilaksanakan	0		-
		Jumlah sosialisasi kepada lembaga pengasuhan anak	4 kali				Jumlah sosialisasi kepada lembaga pengasuhan anak	0		-
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50,000,000						-
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/Kota (APBD Kab/Kota)	1 Lembaga							-
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standart pelayanan minimal	3 Lembaga							-
		Jumlah lembaga pos KDRT yang dioptimalkan	1 Lembaga							-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				200,000,000					0	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	75,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			-
		Jumlah koodinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	19 kali				Jumlah koodinasi dan konsultasi yang dilaksanakan			-
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap lembaga penyediaan sarpras bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	19 kali				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap lembaga penyediaan sarpras bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus			-
		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	1 Laporan				Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota			-
		Jumlah sidang diversifikasi yang dilaksanakan	15 kali				Jumlah sidang diversifikasi yang dilaksanakan			-

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
		Jumlah lembaga layanan yang mendapat pelatihan	4 lembaga				Jumlah lembaga layanan yang mendapat pelatihan	-	
		Jumlah peserta pelatihan manajemen kasus yang dilaksanakan	1200 orang				Jumlah peserta pelatihan manajemen kasus yang dilaksanakan	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
		Jumlah lembagayang menjalin kerjasama dalam penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	3 lembaga				Jumlah lembagayang menjalin kerjasama dalam penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	
		Jumlah pelaksanaan pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di tingkat Kecamatan dan Desa	38 kali				Jumlah pelaksanaan pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di tingkat Kecamatan dan Desa	-	
		Jumlah peserta pelaksanaan pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di tingkat Kecamatan dan Desa	380 orang				Jumlah peserta pelaksanaan pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di tingkat Kecamatan dan Desa	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9,378,137,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				-
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				487,100,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			32,400,000	-
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				317,100,000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			1,639,000	-

Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	KAB.NGA WI	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan	1 Dokumen	50,000,000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,639,000	-
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen					-		
		Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilakukan	8 kali					-		
		Jumlah pertemuan terkait penyusunan GDPK 5 pilar	3 kegiatan					-		
		Jumlah peserta pertemuan terkait penyusunan GDPK	60 orang					-		
		Tersedianya Dokumen GDPK 5 Pilar	1 GDPK					-		
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	30 Orang					-		
Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilakukan	0		-							
Jumlah pertemuan terkait penyusunan GDPK 5 pilar	0		-							
Jumlah peserta pertemuan terkait penyusunan GDPK	0		-							
Tersedianya Dokumen GDPK 5 Pilar	0		-							
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	KAB.NGA WI	Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilakukan	8 kali	42,100,000	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	KAB.NG AWI	Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilakukan		-	-
		Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan	2 kali					-		
		Jumlah pertemuan berbasis SSK	3 kali					-		
		Jumlah peserta pembinaan sekolah siaga kependudukan	45 orang					-		
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	19 Satuan Pendidikan					-		
		Jumlah SSK yang masuk kategori paripurna	3 sekolah					-		
		Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilakukan	8 kali					-		
Jumlah mitra kerja yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan kependudukan	10 institusi		-							
Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan	38 kali		-							
Jumlah pertemuan berbasis kependudukan	4 kali		-							
Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	KAB.NGA WI	Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilakukan	8 kali	200,000,000	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	KAB.NG AWI	Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilakukan		0	-
		Jumlah mitra kerja yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan kependudukan	10 institusi					-		
		Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan	38 kali					-		
		Jumlah pertemuan berbasis kependudukan	4 kali					-		

		Jumlah pertemuan kependudukan dengan mitra terkait dan lintas sektor terkait	4 kali				Jumlah pertemuan kependudukan dengan mitra terkait dan lintas sektor terkait			-
		Jumlah peserta pertemuan berbasis kependudukan	350 orang				Jumlah peserta pertemuan berbasis kependudukan			-
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	KAB.NGA WI	Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilakukan	8 kali	25,000,000	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	KAB.NG AWI	Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilakukan		-	-
		Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan	3 kali				Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan			-
		Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan	19 kali				Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan			-
		Jumlah peserta sarasehan evaluasi hasil pemutakhiran data keluarga	275 orang				Jumlah peserta sarasehan evaluasi hasil pemutakhiran data keluarga			-
		Jumlah sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga	20 kali				Jumlah sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga			-
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				170,000,000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				30,761,000	-
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	KAB.NGA WI	Jumlah data kependudukan yang disediakan	3 data	50,000,000	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	KAB.NG AWI	Jumlah data kependudukan yang disediakan		-	-
		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	0 Dokumen				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			-
		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			-
		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	6 kali				Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan			-
		Jumlah monev yang dilaksanakan/diadakan	19 kali				Jumlah monev yang dilaksanakan/diadakan			-
		Jumlah pertemuan yang dilaksanakan/diadakan	24 kali				Jumlah pertemuan yang dilaksanakan/diadakan			-
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan penyuluhan	650 orang				Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan penyuluhan			-
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	10,000,000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		-	-
		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	19 kali				Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan			-
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi	KAB.NGA WI	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	6 kali	40,000,000	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi	KAB.NG AWI	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan			-

Program KKBPK di Sektor Lain		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	3 Unit		Program KKBPK di Sektor Lain		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk			-
		Jumlah rumah data kependudukan yang mandiri	3 Rumah Data				-			
		Jumlah rumah data kependudukan yang telah terbentuk	3 Rumah Data				-			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	KAB.NGA WI	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	10,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	KAB.NG AWI	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			-
		Jumlah monev yang dilaksanakan/diadakan	19 kali				-			
		Jumlah pertemuan yang dilaksanakan/diadakan	4 kali				-			
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pertemuan	80 orang				-			
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	KAB.NGA WI	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	30,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	KAB.NG AWI	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	30,761,000	-
		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	6 kali				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	150 Orang		-
		Jumlah monev yang dilaksanakan/diadakan	19 kali				Jumlah Jasa Tenaga Operator New Siga yang dibayarkan	6 Kali		-
		Jumlah pertemuan yang dilaksanakan/diadakan	4 kali				Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	11 kali		-
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pertemuan	160 orang				Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pertemuan	0		-
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	KAB.NGA WI	Jumlah balai penyuluh KB yang mendapat langganan internet	19 Balai penyuluh KB	30,000,000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	KAB.NG AWI	Jumlah balai penyuluh KB yang mendapat langganan internet			-
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3 Dokumen				-			
		Jumlah kegiatan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	12 kali				-			
		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	6 kali				-			

		Jumlah monev yang dilaksanakan/diadakan	19 kali				Jumlah monev yang dilaksanakan/diadakan			-
		Jumlah pertemuan yang dilaksanakan/diadakan	4 kali				Jumlah pertemuan yang dilaksanakan/diadakan			-
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pertemuan	160 orang				Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pertemuan			-
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	66.7 %	7,791,520,324	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	66.7 %	145,000,000	-
		Rasio PKB	1:2 Rasio				Rasio PKB	1:2 Rasio		-
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				2,218,520,324	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				0	-
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	KAB.NGA WI	Jumlah evaluasi percepatan program bangga kencana yang dilaksanakan	0 kali	140,000,000	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	KAB.NG AWI	Jumlah evaluasi percepatan program bangga kencana yang dilaksanakan			-
		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	5 kali				Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan			-
		Jumlah MoU/kesepakatan bersama antara stakeholder, mitra kerja dengan OPD KB	34 dokumen				Jumlah MoU/kesepakatan bersama antara stakeholder, mitra kerja dengan OPD KB			-
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0 Organisasi				Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			-
		Jumlah pertemuan koordinasi kemitraan tingkat kecamatan dalam mendukung program bangga kencana	19 kali				Jumlah pertemuan koordinasi kemitraan tingkat kecamatan dalam mendukung program bangga kencana			-
		Jumlah peserta evaluasi advokasi program bangga kencana	45 orang				Jumlah peserta evaluasi advokasi program bangga kencana			-
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi kemitraan tingkat kabupaten dalam mendukung program bangga kencana	350 orang				Jumlah peserta pertemuan koordinasi kemitraan tingkat kabupaten dalam mendukung program bangga kencana			-
		Jumlah peserta sosialisasi advokasi program bangga kencana	45 orang				Jumlah peserta sosialisasi advokasi program bangga kencana			-

		Jumlah satkeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang aktif dalam pengolahan program KKBPK	29 stakeholders/mitra				Jumlah satkeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang aktif dalam pengolahan program KKBPK			-
		Jumlah sosialisasi percepatan program bangga kencana yang dilaksanakan	0 kali				Jumlah sosialisasi percepatan program bangga kencana yang dilaksanakan			-
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	KAB.NGA WI	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	78,520,324	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		0
			Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media elektronik	1 paket			Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media elektronik			-
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	KAB.NGA WI	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	4 kali	310,000,000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	KAB.NG AWI	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		-
			Jumlah perbaikan media KIE yang dilaksanakan	2 kali			Jumlah perbaikan media KIE yang dilaksanakan			-
			Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media cetak yang diadakan	1500 lembar			Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media cetak yang diadakan			-
			Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media luar ruang/baliho yang diadakan	2 kali			Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media luar ruang/baliho yang diadakan			-
			Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media luar ruang yang diadakan	3 kali			Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media luar ruang yang diadakan			-
			Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media radio/elektronik yang diadakan	2 kali			Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media radio/elektronik yang diadakan			-
			Jumlah Tim manajemen BOKB yang melakukan monev	12 orang			Jumlah Tim manajemen BOKB yang melakukan monev			-
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Unit			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			-

			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Unit				Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			-
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	KAB.NGA WI		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0 Dokumen	90,000,000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	KAB.NG AWI	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		-	-
			Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	19 kali				Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan			-
			Jumlah penyuluhan program KKBPK	2 kali				Jumlah penyuluhan program KKBPK			-
			Jumlah perbaikan media KIE yang dilaksanakan	2 kali				Jumlah perbaikan media KIE yang dilaksanakan			-
			Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media elektronik/radio yang diadakan	5 paket				Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media elektronik/radio yang diadakan			-
			Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media luar ruangan/baliho yang diadakan	2 paket				Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media luar ruangan/baliho yang diadakan			-
			Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media luar ruangan yang dilaksanakan	5 kali				Jumlah promosi dan KIE program KKBPK melalui media luar ruangan yang dilaksanakan			-
			Jumlah promosi KIE program KKBPK melalui media cetak yang diadakan	500 lembar				Jumlah promosi KIE program KKBPK melalui media cetak yang diadakan			-
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	KAB.NGA WI					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		0 Laporan
Jumlah pelaksanaan rakorcam, rakordes dan minilok di masing-masing Balai penyuluhan KB yang tepat waktu	38 kali	Jumlah pelaksanaan rakorcam, rakordes dan minilok di masing-masing Balai penyuluhan KB yang tepat waktu				-					
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	KAB.NGA WI		Jumlah dukungan operasional yang diberikan kepada balai penyuluh KB	228 kali	1,100,000,000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	KAB.NG AWI	Jumlah dukungan operasional yang diberikan kepada balai penyuluh KB		-	-

			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			-
			Jumlah orientasi lini lapangan yang dilaksanakan	19 kali				Jumlah orientasi lini lapangan yang dilaksanakan			-
			Jumlah pembinaan kader yang dilaksanakan oleh penyuluh KB Kecamatan	19 kali				Jumlah pembinaan kader yang dilaksanakan oleh penyuluh KB Kecamatan			-
			Jumlah pengelolaan dan pemanfaatan data informasi melalui balai penyuluhan KB Kecamatan	5 kali				Jumlah pengelolaan dan pemanfaatan data informasi melalui balai penyuluhan KB Kecamatan			-
	Pengendalian Program KKBPK	KAB.NGA WI	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	0 Laporan	200,000,000	Pengendalian Program KKBPK	KAB.NG AWI	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			-
			Jumlah monev operasional BOKB bagi Balai Penyuluhan KB Kecamatan	19 kali				Jumlah monev operasional BOKB bagi Balai Penyuluhan KB Kecamatan			-
			Jumlah pertemuan koordinasi antara OPD KB dengan penyuluh KB Kecamatan	6 kali				Jumlah pertemuan koordinasi antara OPD KB dengan penyuluh KB Kecamatan			-
			Jumlah sosialisasi dan koordinasi program KKBPK	3 kali				Jumlah sosialisasi dan koordinasi program KKBPK			-
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				940,000,000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				100,000,000	-
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	KAB.NGA WI	Jumlah IMP yang dibina oleh PKB/PLKB	1528 orang	170,000,000	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	KAB.NG AWI	Jumlah IMP yang dibina oleh PKB/PLKB			-
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	9 Organisasi				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			-
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	KAB.NGA WI	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang diadakan	90 orang	250,000,000	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	KAB.NG AWI	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang diadakan			-
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	0 Unit				Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia			-

Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	KAB.NGA WI	Jumlah jasa PKB/PLKB Non PNS yang dibayarkan	60 kali	170,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	KAB.NG AWI	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 Laporan	100,000,000	Ha sil Pe mu tak hir an
		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	19 kali				Jumlah jasa penyuluh KB Non PNS yang dibayarkan	48 kali		-
		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 Laporan				Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	6 kali		-
		Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja PKB/PLKB yang dilaksanakan	6 kali				Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja PKB/PLKB yang dilaksanakan	0		-
		Jumlah pembinaan PKB/PLKB yang dilaksanakan	5 kali				Jumlah pembinaan PKB/PLKB yang dilaksanakan	0		-
		Jumlah PKB Non ASN yang di rekrut	5 orang				Jumlah PKB Non ASN yang di rekrut	0		-
		Jumlah PKB/PLKB yang mengikuti pembinaan secara rutin	85 orang				Jumlah PKB/PLKB yang mengikuti pembinaan secara rutin	0		-
		Jumlah PKB/PLKB yang mengikuti pembinaan secara rutin	85 orang				Jumlah PKB/PLKB yang mengikuti pembinaan secara rutin	0		-
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	KAB.NGA WI	Jumlah jasa yang diberikan kepada PPKBD dan SUB PPKBD yang melakukan program Bangga Kencana	6112 orang	350,000,000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	KAB.NG AWI	Jumlah jasa yang diberikan kepada PPKBD dan SUB PPKBD yang melakukan program Bangga Kencana	-	-	-
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1528 Orang				Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-		-
		Jumlah konseling yang dilaksanakan	12 kali				Jumlah konseling yang dilaksanakan	-		-
		Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	10 kali				Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	-		-
		Jumlah koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	19 kali				Jumlah koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	-		-

		Jumlah lokasi monitoring dan Evaluasi PPKBD dan SUB PPKBD yang dilaksanakan	19 kecamatan				Jumlah lokasi monitoring dan Evaluasi PPKBD dan SUB PPKBD yang dilaksanakan			-	
		Jumlah monitoring dan evaluasi PPKBD dan SUB PPKBD	19 kali				Jumlah monitoring dan evaluasi PPKBD dan SUB PPKBD			-	
		Jumlah pendataan yang dilaksanakan	12 kali				Jumlah pendataan yang dilaksanakan			-	
		Jumlah PKB/PLKB yang mengikuti pembinaan dan penyuluhan	85 orang				Jumlah PKB/PLKB yang mengikuti pembinaan dan penyuluhan			-	
		Jumlah PPKBD dan SUB PPKBD yang melakukan program KKBPK	1528 orang				Jumlah PPKBD dan SUB PPKBD yang melakukan program KKBPK			-	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		2,683,000,000		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			45,000,000	-	
	KAB.NGA WI	Jumlah dokumen laporan reporting dan recording (r/r) pelayanan KB dan Pembinaan ber-KB yang dianalisa	12 dokumen	200,000,000		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	KAB.NG AWI	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan	25,000,000	-
		Jumlah Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	24 faskes				Jumlah jasa fasilitator pelayanan KB yang dibayarkan	12 kali		-	
		Jumlah faskes yang terpenuhi kebutuhan Alokon dalam setahun	24 faskes				Jumlah pendistribusian alat dan obat kontrasepsi yang dilaksanakan	32 kali		-	
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan							-	
		Jumlah pertemuan stockopname di gudang Alokon beserta Faskes	4 kali							-	
		Jumlah visitasi ke Faskes yang sudah teregistrasi melalui aplikasi Siga	32 kali							-	
	KAB.NGA WI	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	100 Orang	30,000,000		Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	KAB.NG AWI	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		0	-

			Jumlah dokumen laporan faskes penerima fasilitas pelayanan KB yang disusun	12 dokumen				Jumlah dokumen laporan faskes penerima fasilitas pelayanan KB yang disusun			-
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	KAB.NGA WI	Jumlah kesehatan KB di Kab/Kota dengan kesertaan rendah	0 orang	1,970,000,000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	KAB.NG AWI	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1200 Orang	20,000,000	-	
		Jumlah kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	2507 orang				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	150 Orang		-	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1200 Orang				Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	25 kali		-	
		Jumlah peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	97418 orang				Jumlah peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0		-	
		Jumlah peserta KB Implant yang terlayani	380 orang				Jumlah peserta KB Implant yang terlayani	0		-	
		Jumlah peserta KB IUD yang terlayani	950 orang				Jumlah peserta KB IUD yang terlayani	0		-	
		Jumlah peserta KB MOP yang terlayani	3 orang				Jumlah peserta KB MOP yang terlayani	0		-	
		Jumlah peserta KB MOW yang terlayani	30 orang				Jumlah peserta KB MOW yang terlayani	0		-	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	KAB.NGA WI				Jumlah dokumen laporan persediaan dan kebutuhan Alokon	12 dokumen		25,000,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 Dokumen			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	-						
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	KAB.NGA WI	Jumlah Balai Penyuluhan tingkat Kecamatan yang direhab	3 balai	280,000,000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	KAB.NG AWI	Jumlah Balai Penyuluhan tingkat Kecamatan yang direhab	0	-		
		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	32 Unit				Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		-		
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	KAB.NGA WI	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	19 kali	83,000,000	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	KAB.NG AWI	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	0	-		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	150 Orang				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		-		
		Jumlah Pelayanan KB Pasca Persalinan	750 kali				Jumlah Pelayanan KB Pasca Persalinan		-		
		Jumlah pembinaan, pelayanan dan pergerakan KB bagi Faskes	2 kali				Jumlah pembinaan, pelayanan dan pergerakan KB bagi Faskes		-		

			Jumlah pembinaan pelayanan KB bagi akseptor KB	19 kali				Jumlah pembinaan pelayanan KB bagi akseptor KB			-
			Jumlah peserta pembinaan pasca pelayanan bagi akseptor KB	0 orang				Jumlah peserta pembinaan pasca pelayanan bagi akseptor KB			-
			Jumlah peserta pembinaan pelayanan KB	285 orang				Jumlah peserta pembinaan pelayanan KB			-
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	KAB.NGA WI	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	15,000,000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	KAB.NG AWI	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			-	-
		Jumlah promosi dan konseling Kespro dan hak-hak reproduksi di Faskes dan Poktan	10 kali				Jumlah promosi dan konseling Kespro dan hak-hak reproduksi di Faskes dan Poktan			-	
		Jumlah Sosialisasi Pelayanan KB dan Kespro di Faskes dan jejaringnya	6 kali				Jumlah Sosialisasi Pelayanan KB dan Kespro di Faskes dan jejaringnya			-	
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	KAB.NGA WI	Jumlah Pelatihan Pelayanan KB	6 kali	15,000,000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	KAB.NG AWI	Jumlah Pelatihan Pelayanan KB		0	-	-
		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	25 Orang				Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			-	
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	KAB.NGA WI	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	30,000,000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	KAB.NG AWI	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		0	-	-
		Jumlah Pelayanan KB moment	4 kali				Jumlah Pelayanan KB moment			-	
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	KAB.NGA WI	Jumlah Konseling dan KIE pasca salin yang dilaksanakan	50 kali	20,000,000	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	KAB.NG AWI	Jumlah Konseling dan KIE pasca salin yang dilaksanakan		0	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	50 Orang				Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran			-	
Peningkatan Kesertaan KB Pria	KAB.NGA WI	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	0 Orang	25,000,000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	KAB.NG AWI	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria		0	-	-
		Jumlah peserta KB Pria	25 akseptor				Jumlah peserta KB Pria			-	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				1,950,000,000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				0	-	

	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	KAB.NGA WI	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0 Organisasi	50,000,000	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	KAB.NG AWI	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			-	-
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	KAB.NGA WI	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	0 Kampung	1,850,000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	KAB.NG AWI	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		0	-	
Jumlah laporan perkembangan Kampung KB melalui aplikasi			19 laporan	Jumlah laporan perkembangan Kampung KB melalui aplikasi					-			
Jumlah Orientasi lini lapangan di Kampung KB yang dilaksanakan			19 kali	Jumlah Orientasi lini lapangan di Kampung KB yang dilaksanakan					-			
Jumlah pertemuan kelompok kegiatan Kampung KB yang dilaksanakan			19 kali	Jumlah pertemuan kelompok kegiatan Kampung KB yang dilaksanakan					-			
Jumlah pertemuan pokja Kampung KB yang dilaksanakan			19 kali	Jumlah pertemuan pokja Kampung KB yang dilaksanakan					-			
Pembinaan Terpadu Kampung KB	KAB.NGA WI	Jumlah Kampung KB yang dibina	50 Kampung KB	50,000,000	Pembinaan Terpadu Kampung KB	KAB.NG AWI	Jumlah Kampung KB yang dibina		0	-		
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB			-		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	72 %	1,545,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	72 %	232,600,000	-		
		Persentase kelompok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera yang diintervensi	100 %				Persentase kelompok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera yang diintervensi	100 %		-		
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1,500,000,000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				132,600,000	-		
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	KAB.NGA WI	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 unit	260,000,000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	KAB.NG AWI	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		-	-		
		Jumlah sarana BKB KIT Stunting yang diadakan	1 paket				Jumlah sarana BKB KIT Stunting yang diadakan			-		

Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	KAB.NGA WI	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80 klmpk	60,000,000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	KAB.NG AWI	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		0	-
		Jumlah pertemuan edukasi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dalam penanggulangan stunting	19 kali				Jumlah pertemuan edukasi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dalam penanggulangan stunting			-
		Jumlah pertemuan kespro stunting bagi calon pengantin	19 kali				Jumlah pertemuan kespro stunting bagi calon pengantin			-
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	KAB.NGA WI	Jumlah evaluasi kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dilaksanakan	6 kali	110,000,000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	KAB.NG AWI	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	5,000,000	Ha sil Pe mu tak hir an
		Jumlah kelompok kegiatan yang teregistrasi dalam aplikasi	19 kelompok				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	25 Orang		-
		Jumlah ketua kelompok BKB yang menerima telfon	275 orang				Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	3 kali		-
		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	19 kali							-
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan							-
		Jumlah MoU/kerjasama antara organisasi pemerintahan desa dengan OPD KB	10 dokumen							-
		Jumlah pertemuan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dilaksanakan	19 kali							-
		Jumlah peserta pelatihan kelompok BKB program prioritas nasional yang dilaksanakan	380 orang							-
		Jumlah peserta pelatihan kelompok BKL yang dilaksanakan	80 orang							-

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	KAB.NGA WI	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 laporan	30,000,000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	KAB.NG AWI	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	107,600,000	-
		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan/diadakan	19 kali				Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan percepatan penurunan stunting melalui Duta Genre	1140 Orang		-
							Jumlah peserta yang mengikuti promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	150 Orang		-
							Jumlah peserta yang mengikuti rapat persiapan kegiatan percepatan penurunan stunting melalui Duta Genre	45 Orang		-
							Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	6 kali		-
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				45,000,000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				100,000,000	-
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	KAB.NGA WI	Jumlah MoU/Kesepakatan bersama antara OPD KB dengan Lintas Sektor yang disepakati	19 dokumen	45,000,000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	KAB.NG AWI	Jumlah MoU/Kesepakatan bersama antara OPD KB dengan Lintas Sektor yang disepakati			-
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	24 Organisasi				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			-
		Jumlah pertemuan sinergitas antara penyuluh KB dengan Bidan/Tenaga Kesehatan	19 kali				Jumlah pertemuan sinergitas antara penyuluh KB dengan Bidan/Tenaga Kesehatan			-

	SUB KEGIATAN BARU					Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	KAB.NG AWI	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	35 laporan	100,000,000	Hasil Pe mu tak hir an
								Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	1140 Orang		-
								Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	39 kali		-
	JUMLAH TOTAL				18,518,580,024		JUMLAH TOTAL			6,958,209,455	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana antara lain :

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Ket
1	2	3	4
A	Nasional		
1.	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	RKP KPPPA Pusat	
2.	Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender		
3.	Meningkatkan capaian indeks perlindungan anak		
4.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	RKP BKKBN Pusat	
5.	Menurunnya Angka kelahiran Total		
6.	Meningkatnya prevelensi kontrasepsi (CPR) modern		
7.	Menurunnya kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)		
8.	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)		
9.	Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur (15-49 tahun)		

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disusun merupakan proses yang harus dilaksanakan agar Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis dapat tercapai.

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dikaitkan dengan target sasaran kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGAWI

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2024
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,05-93,15
		Meningkatnya kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	81,30
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,00
		Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,00
2	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk		Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	
		Terkendalinya kelahiran penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.0

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.a. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs maka program yang dipilih disesuaikan dengan RPJMN Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dengan tidak meninggalkan kearifan lokal spesifik Kabupaten Ngawi;
- b. Indikator Kinerja yang harus dicapai

4.b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal Satuan Kerja Perangkat Daerah, Untuk Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi mempunyai 10 program, 29 kegiatan dan 48 sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah melalui sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah melalui sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - d. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

C. Program Perlindungan Perempuan dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :

- a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

F. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
 - a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

G. Program Perlindungan Khusus Anak dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
 - a. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
- 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
- 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
 - a. Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota
 - b. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
 - c. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
 - d. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota
 - e. Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota

H. Program Pengendalian Penduduk dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui sub kegiatan :

- a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
 - c. Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
 - d. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
 - a. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
 - b. Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - d. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - e. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - f. Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
- I. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal melalui sub kegiatan :
 - a. Pengendalian Program KKBPK
 - b. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana
 - c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
 - d. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - e. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - f. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - g. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) melalui sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
 - b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - c. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

- d. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :
- a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - c. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - d. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - e. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
 - f. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - g. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - h. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
 - i. Peningkatan Kesertaan KB Pria
 - j. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - k. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB melalui sub kegiatan :
- a. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - b. Pembinaan Terpadu Kampung KB
 - c. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
- J. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dilaksanakan melalui kegiatan :
- 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui sub kegiatan :
 - a. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
 - b. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

- c. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 - d. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 - e. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 - f. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
 - g. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui sub kegiatan :
- a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - b. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
 - c. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
- 4.c. Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realita yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi. Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2024, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten melaksanakan

10 program, 29 kegiatan dan 48 sub kegiatan serta total anggaran Rp. 6.958.209.455,- yang seluruhnya bersumber dari APBD. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dan prakiraan maju tahun 2025 secara detail dapat dilihat pada tabel 4.1 :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																	
Kab. Ngawi																	
Tahun 2024																	
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA																	
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA																	
Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA							6.958.209.455,00					19.162.099.552,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.958.209.455,00					19.162.099.552,00		
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							6.548.209.455,00					9.166.803.422,00		
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.608.209.455,00					5.793.683.422,00		
2	08	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							14.303.500,00					49.500.000,00	
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	11 Dokumen	100 %	5.271.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	22.000.000,00
2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Karangtengah	100 %	1 Dokumen	100 %	1.070.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000,00

2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	1 Dokumen	100 %	1.070.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	
2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	2 Dokumen	100 %	1.302.500,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000,00	
2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	2 Dokumen	100 %	1.590.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000,00	
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	6 Laporan	100 %	4.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	7.500.000,00	
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.904.015.893,00					4.908.183.422,00	
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	1040 Orang/bulan	100 %	4.898.015.893,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1040 Orang/bulan	4.892.183.422,00				
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	1 Laporan	100 %	3.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.000.000,00				
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	50 Laporan	100 %	3.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan	8.000.000,00				
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													37.000.000,00			46.000.000,00
2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	94 Paket	100 %	12.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket	21.000.000,00				
2	08	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	100 Orang	100 %	25.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	25.000.000,00				

2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							200.386.410,00						204.000.000,00
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	24 Paket	100 %	4.893.410,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	6.000.000,00	
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	210 Paket	100 %	30.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	210 Paket	46.000.000,00	
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	25 Paket	100 %	10.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	28.000.000,00	
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	200 Paket	100 %	12.002.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	200 Paket	46.000.000,00	
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	10 Dokumen	100 %	27.780.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	13.000.000,00	
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	90 Laporan	100 %	5.520.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	90 Laporan	5.000.000,00	

2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	57 Laporan	100 %	110.191.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 Laporan	60.000.000,00	
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							146.302.000,00					220.000.000,00	
2	08	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	Unit	unit	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	115.000.000,00	
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	10 Unit	10 unit	99.979.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	30.000.000,00	
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	5 Unit	10 unit	46.323.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75.000.000,00	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							217.131.652,00					243.200.000,00	
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	60 Laporan	100 %	85.784.152,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	97.000.000,00	

2	08	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	12 Laporan	100 %	39.987.500,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	51.200.000,00	
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	160 Laporan	100 %	91.360.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	160 Laporan	95.000.000,00	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							89.070.000,00					122.800.000,00	
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	Unit	%	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	10.000.000,00	
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	140 Unit	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140 Unit	76.000.000,00	

2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	40 Unit	100 %	14.070.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	26.800.000,00
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Karangtengah	100 %	12 Unit	100 %	25.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	10.000.000,00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							110.000.000,00				552.120.000,00	
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							110.000.000,00				337.120.000,00	
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG												
					Persentase partisipasi perempuan di sektor pembangunan Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.75 % 30 %	Dokumen	%	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000,00

2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota													
					Persentase partisipasi perempuan di sektor pembangunan Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.75 % 30 %	1 Dokumen	65 % 100 %	110.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	220.000.000,00		
						Jumlah peserta yang mengikuti rapat APE				70 orang								
						Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG				150 orang								
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG													
					Persentase partisipasi perempuan di sektor pembangunan Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.75 % 30 %	Perangkat Daerah	% %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	12.120.000,00		

2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG								0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Perangkat Daerah	45.000.000,00	
					Persentase partisipasi perempuan di sektor pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.75 % 30 %	Perangkat Daerah	% %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Perangkat Daerah	45.000.000,00		
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								0,00					75.000.000,00	
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	75.000.000,00	
					Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Persentase partisipasi perempuan di lembaga Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 % 9075 %	Dokumen	0 % 0 % 0 % 0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	75.000.000,00		
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								0,00					140.000.000,00	
2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

					Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD Persentase partisipasi perempuan di sektor pembangunan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Persentase kelembagaan PUG yang aktif Persentase lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 % 905 %	Lembaga	0% 0%	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Lembaga	15.000.000,00
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD Persentase partisipasi perempuan di sektor pembangunan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Persentase kelembagaan PUG yang aktif Persentase lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 % 905 %	Orang	0 % 0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5 Orang	50.000.000,00
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD Persentase partisipasi perempuan di sektor pembangunan	Jumlah Dokumen Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase kelembagaan PUG yang aktif Persentase lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 % 905 %	Dokumen	0% 0%	0,00	-		Jumlah Dokumen Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	75.000.000,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							150.000.000,00					624.000.000,00
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							20.000.000,00					110.000.000,00
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	Persentase peserta sosialisasi yang paham tentang UU PKDRT Rasio KDRT	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2:100.000 rasio	1 Dokumen	100 % 0.002 Rasio	20.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00

						Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota															
						Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUP				200 orang											
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peserta sosialisasi yang paham tentang UU PKDRT Rasio KDRT	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2:100.000 rasio	19 Perangkat Daerah	0 % Rasio	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Perangkat Daerah	10.000.000,00					
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						130.000.000,00							389.000.000,00			
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2:100.000 rasio	20 Orang	100 %	110.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang	239.000.000,00					
						Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi					200 orang										

2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2:100.000 rasio	6 Layanan	100 %	20.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Layanan Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	150.000.000,00
						Jumlah jasa psikolog UPTD PPA yang dibayarkan				12 kali							
						Jumlah Talkshow melalui radio yang dilaksanakan				1 paket							
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0,00						125.000.000,00	
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan/pusat pelayanan terpadu yang aktif	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2:100.000 rasio	0 Orang	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	55.000.000,00

2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							0,00	-	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.000.000,00
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan/pusat pelayanan terpadu yang aktif	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2:100.000 rasio	0 Dokumen	0 %					
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							420.000.000,00				1.185.000.000,00
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0,00				650.000.000,00
2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											
					Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang memperoleh sosialisasi dan pelatihan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Perangkat Daerah	0%	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Perangkat Daerah	350.000.000,00
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											
					Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang memperoleh sosialisasi dan pelatihan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	0%	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							420.000.000,00				535.000.000,00
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											

					Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, koordinasi dan konsultasi terkait peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG yang tepat waktu	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Orang	100 % 100 %	20.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	7 Orang	85.000.000,00	
						Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Puspa				288 Orang								
2	08	04	2.02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
					Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi, koordinasi dan konsultasi terkait peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG yang tepat waktu	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 % 100 %	400.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen	450.000.000,00	

2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota													
					Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data gender dan anak yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000,00	
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan rapat				80 Orang								
						Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan				8 Orang								
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						210.000.000,00						190.000.000,00	
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						210.000.000,00						130.000.000,00	
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
					Persentase Pembangunan sektoral berbasis ramah anak yang sesuai standart	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Persentase Forum Anak yang terbentuk (Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan) Persentase lembaga yang mendukung Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Organisasi	100 % 100 %	100.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	70.000.000,00	

					Persentase Pembangunan sektoral berbasis ramah anak yang sesuai standart	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak Persentase desa yang mempunyai fasilitas ramah anak	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	0 Dokumen	0% 0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000,00		
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							40.000.000,00							667.000.000,00
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							20.000.000,00							80.000.000,00
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA														
					Persentase lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai standart	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Persentase anak korban kekerasan Persentase keterlibatan Perangkat Daerah dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Kegiatan	0.002 % 100 %	20.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah kegiatan pencegahan terpadu	3 Kegiatan	80.000.000,00		
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan				300 Orang									
						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				8 kali									
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							10.000.000,00						155.000.000,00	
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
					Persentase lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai standart	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Orang	0 % 0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	15 Orang	30.000.000,00		

2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK													
					Persentase lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai standart	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	15 Orang	100 % 100 %	10.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	15 Orang	125.000.000,00	
						Jumlah Talkshow melalui radio yang dilaksanakan				1 paket								
						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				30 kali								
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							10.000.000,00					432.000.000,00	
2	08	07	2.03	0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota													
					Persentase lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai standart	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standart	Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standart	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Lembaga	0%	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	3 Lembaga	32.000.000,00	
2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota													
					Persentase lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai standart	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standart	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Kegiatan	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	3 Kegiatan	50.000.000,00	

2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/												
					Persentase lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai standart	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Orang	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	1 Orang	120.000.000,00
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota												
					Persentase lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai standart	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Dokumen	100 %	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	5 Dokumen	150.000.000,00
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan				120 Orang							
						Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan				6 kali							
2	08	07	2.03	0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota												
					Persentase lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai standart	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Orang	100 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	1 Orang	80.000.000,00
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							410.000.000,00					9.995.296.130,00
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							32.400.000,00					517.100.000,00
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							1.639.000,00					337.100.000,00
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota												

					Persentase Data Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tersedia	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	1.639.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000,00	
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan				30 Orang								
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal													
					Persentase Data Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tersedia	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Satuan Pendidikan	0%	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	19 Satuan Pendidikan	47.100.000,00	

2	14	02	2.01	0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														
					Persentase Data Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tersedia	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Organisasi	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10 Organisasi	190.000.000,00		
					Persentase Data Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tersedia	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Organisasi	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	0 Organisasi	190.000.000,00		
2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
					Persentase Data Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tersedia	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Kegiatan	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	20 Kegiatan	40.000.000,00		

2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							30.761.000,00					180.000.000,00
2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan												
					Persentase Data Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tersedia	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	50.000.000,00
2	14	02	2.02	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan												
					Persentase Data Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tersedia	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	5.000.000,00
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga												
					Persentase Data Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tersedia	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Laporan	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	10.000.000,00
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga												
					Persentase Data Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tersedia	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	30.761.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	40.000.000,00
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan					150 Orang						
						Jumlah Jasa Tenaga Operator New Siga yang dibayarkan					6 Kali						
						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan					11 kali						

2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB												
					Persentase Data Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tersedia	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3 Dokumen	35.000.000,00
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain												
					Persentase Data Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tersedia	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Unit	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	3 Unit	40.000.000,00
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							145.000.000,00				7.872.383.000,00	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							0,00				2.215.000.000,00	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK												
					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Persentase KIE yang dilaksanakan sesuai target Persentase lembaga mitra yang mendukung program KKBPK Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Laporan	0% 0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	200.000.000,00

2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana												
					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Persentase KIE yang dilaksanakan sesuai target Persentase lembaga mitra yang mendukung program KKBPK Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Unit	0 % 0 % 0 %	0,00	-		Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Unit	300.000.000,00
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana												
					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Persentase KIE yang dilaksanakan sesuai target Persentase lembaga mitra yang mendukung program KKBPK Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Laporan	0 % 0 % 0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1.100.000.000,00	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)												

					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase KIE yang dilaksanakan sesuai target Persentase lembaga mitra yang mendukung program KKBPK Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Laporan	0 % 0 % 0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	300.000.000,00			
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang															
					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase KIE yang dilaksanakan sesuai target Persentase lembaga mitra yang mendukung program KKBPK Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	Dokumen	0% 0% 0%	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	19 Dokumen	95.000.000,00			
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal															
					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Persentase KIE yang dilaksanakan sesuai target Persentase lembaga mitra yang mendukung program KKBPK Persentase masyarakat	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Dokumen	0% 0% 0%	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	80.000.000,00			

						Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)											
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													
					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase KIE yang dilaksanakan sesuai target Persentase lembaga mitra yang mendukung program KKBPK Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Organisasi	0 % 0 % 0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	140.000.000,00		
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							100.000.000,00					969.383.000,00	
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB													

					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Persentase kader IMP yang paham dan terampil dalam melaksanakan penyuluhan/ko nseling kepada masyarakat Persentase tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berkinerja baik dan disiplin untuk mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana Persentase tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berkualitas dan terampil dalam melaksanakan Program Bangga Kencana	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Unit	0 % 0 % 0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Pendukung Operasional PKB/PLKB Tersedia	Sarana Operasional yang	10 Unit	200.000.000,00
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)												

					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase kader IMP yang paham dan terampil dalam melaksanakan penyuluhan/ko nseling kepada masyarakat Persentase tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berkinerja baik dan disiplin untuk mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana Persentase tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berkualitas dan terampil dalam melaksanakan Program Bangga Kencana	Kab. Ngawi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Orang	0 % 0 % 0 %	0,00	PENDAPATA N TRANSFER	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1528 Orang	400.000.000,00
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB											

					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase kader IMP yang paham dan terampil dalam melaksanakan penyuluhan/ko nseling kepada masyarakat Persentase tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berkinerja baik dan disiplin untuk mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana Persentase tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berkualitas dan terampil dalam melaksanakan Program Bangga Kencana	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Organisasi	0 % 0 % 0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	9 Organisasi	199.383.000,00
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)											

					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase kader IMP yang paham dan terampil dalam melaksanakan penyuluhan/ko nseling kepada masyarakat Persentase tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berkinerja baik dan disiplin untuk mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana Persentase tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berkualitas dan terampil dalam melaksanakan Program Bangga Kencana	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	2 Laporan	100 % 100 % 100 %	100.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 Laporan	170.000.000,00		
						Jumlah jasa penyuluh KB Non PNS yang dibayarkan				48 kali									
						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				6 kali									
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota							45.000.000,00					2.688.000.000,00		
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (UnmeetNeed)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	3 Laporan	6 %	25.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan	200.000.000,00	
						Jumlah jasa fasilitator pelayanan KB yang dibayarkan				12 kali								
						Jumlah pendistribusian alat dan obat kontrasepsi yang dilaksanakan				32 kali								
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													
					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (UnmeetNeed)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	1200 Orang	6 %	20.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1200 Orang	1.970.000.000,00	
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan				150 Orang								
						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				25 kali								
2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB													

					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (UnmeetNeed)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Dokumen	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 Dokumen	25.000.000,00		
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (UnmeetNeed)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Unit	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	32 Unit	280.000.000,00		
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB														
					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (UnmeetNeed)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Orang	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	150 Orang	88.000.000,00		
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (UnmeetNeed)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Laporan	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	15.000.000,00		
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi														

					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (UnmeetNeed)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Orang	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	25 Orang	15.000.000,00		
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (UnmeetNeed)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Laporan	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	20.000.000,00		
2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria														
					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (UnmeetNeed)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Orang	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	1 Orang	25.000.000,00		
2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB														
					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (UnmeetNeed)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Orang	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	100 Orang	30.000.000,00		
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan														
					Rasio PKB Angka prevelensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (UnmeetNeed)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1:2 Rasio 66.8 %	0 Orang	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	50 Orang	20.000.000,00		

2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)													
					Persentase kelompok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera yang diintervensi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dan Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 75 %	1 Laporan	100 % 100 %	107.600.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	30.000.000,00	
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan percepatan penurunan stunting melalui Duta Genre				1140 Orang								
						Jumlah peserta yang mengikuti promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				150 Orang								
						Jumlah peserta yang mengikuti rapat persiapan kegiatan percepatan penurunan stunting melalui Duta Genre				45 Orang								
						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				6 kali								

2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													
					Persentase kelompok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera yang diintervensi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 75 %	2 Laporan	100 % 100 %	5.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	110.000.000,00	
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan				25 Orang								
						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				3 kali								
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													
					Persentase kelompok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera yang diintervensi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 75 %	0 Unit	0 % 0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	275.000.000,00	
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													

					Persentase kelompok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera yang diintervensi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 75 %	0 Orang	0 % 0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	38 Orang	65.000.000,00
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))											
					Persentase kelompok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera yang diintervensi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 75 %	0 Laporan	0 % 0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	55.813.130,00
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))											

					Persentase kelompok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera yang di intervensi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 75 %	38 Orang	100 % 100 %	20.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	38 Orang	920.000.000,00
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penurunan stunting melalui TPK dan pelaksana ketahanan kesejahteraan keluarga				250 Orang						
						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				7 Orang						
2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											

					Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Persentase kelompok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera yang diintervensi	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Persentase pelaksanaan kesepakatan bersama antar OPD KB dengan lintas sektor dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 % 100 %	0 laporan	0 %	0,00	PENDAPATAN TRANSFER		Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	19 laporan	25.000.000,00
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)												
					Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Persentase kelompok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera yang diintervensi	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Persentase pelaksanaan kesepakatan bersama antar OPD KB dengan lintas sektor dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 % 100 %	35 laporan	100 %	100.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	35 laporan	20.000.000,00
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan				1140 Orang							
						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				39 kali							
TOTAL												6.958.209.455,00			19.352.099.552,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen rencana kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi;
2. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi ini berpedoman pada Perubahan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Rencana Strategis untuk tahun 2024 telah termuat dalam Rencana Kerja. Selain itu terdapat penambahan output / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi. Begitu pula dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi;
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

- a. Melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

